

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan pendorong terkuat perdagangan dunia dan kemakmuran menurut *United Nations World Tourism Organisation* (UNWTO) tahun 2010. Data dari UNWTO tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 1,138 miliar wisatawan yang melakukan perjalanan wisata di seluruh dunia. Wisatawan dunia yang memilih wilayah Asia Pasifik sebagai destinasi wisata sebanyak 263 juta wisatawan. Terjadi kenaikan jumlah wisatawan rata-rata dunia sebanyak 5%, di mana kenaikan di wilayah Asia Pasifik juga sebesar 5%. Sementara itu, penerimaan atau uang yang mengalir selama 2014 dalam dunia pariwisata mencapai sebesar 1.159 miliar US\$, dengan perputaran uang di Asia Pasifik sebesar 398 miliar US\$ atau naik 8% dari tahun 2013 yang menerima 367 miliar US\$. Salah satu negara yang berada di kawasan Asia Pasifik yang merasakan dampak dari adanya pariwisata adalah Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia pada dasarnya ditujukan untuk beberapa tujuan pokok diantaranya adalah untuk penghapusan kemiskinan (*poverty alleviation*), pembangunan berkesinambungan (*sustainable development*), serta peningkatan ekonomi dan industri (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2005). Sektor pariwisata sebagai potensi andalan dan unggulan diharapkan memberikan dampak yang signifikan bagi suatu daerah, khususnya Indonesia yang sudah dikenal dengan beragam pariwisatanya, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, maupun wisata religi. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 juga dijelaskan tujuan kepariwisataan itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran. Sejalan dengan hal tersebut, sektor industri pariwisata di Indonesia sudah menjadi salah satu bagian penting dalam menyumbang devisa negara. Menurut data ranking devisa pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2014, sektor industri pariwisata merupakan penyumbang devisa

terbesar ke-5 di Indonesia dari tahun 2012-2014. Sementara itu, menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun 2013, Indonesia berada di peringkat 70 dunia dalam indeks daya saing pariwisata dan perjalanan dunia. Pada tahun 2015 Indonesia memiliki target tercapainya 10 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Salah satu pulau yang menjadi tujuan wisata adalah Pulau Bali atau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata.

Menurut Majalah Travel+Leisure tahun 2014, Provinsi Bali adalah pulau terbaik nomor 6 di dunia pada tahun 2013 dan nomor 5 di dunia pada tahun 2014, serta Bali menjadi pulau terbaik se-Asia tahun 2014. Untuk jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali dari tahun 2012-2014 terjadi peningkatan, di mana pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 9,9 juta wisatawan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 13,1 juta wisatawan atau mengalami peningkatan sebesar 9,68%. Hal tersebut menjadikan bandara internasional Ngurah Rai, Bali sebagai bandara (pintu masuk) di Indonesia yang paling banyak menjadi tujuan wisatawan mancanegara menurut data dari Kemenparekraf tahun 2014. Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Bali sudah mempersiapkan bidang pariwisata dengan didukung sumber daya manusia yang handal, akomodasi berupa hotel berbintang serta keindahan panorama alam dan keunikan seni budaya yang lestari.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan bahwa, sektor Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum menjadi penyumbang terbesar dengan persentase mencapai sebesar 21,77% dari 17 sektor yang ada. Sumbangan dari sektor Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi Bali, menunjukkan bahwa pariwisata menjadi kegiatan utama dan sektor unggulan di Provinsi Bali. Walaupun pariwisata di Provinsi Bali mengalami perkembangan yang sangat pesat, Provinsi Bali masih memiliki permasalahan kemiskinan yang belum teratasi. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sebesar 6,89 %, di mana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebanyak 158,9 ribu jiwa dan meningkat menjadi sebanyak 196 ribu jiwa pada tahun 2014.

Pengembangan pariwisata di Provinsi Bali sebagai salah satu tujuan wisata nasional dan internasional didasarkan pada banyak tempat wisata, baik wisata alam, sejarah, maupun religi yang khas. Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Bali, diharapkan sektor-sektor lainnya juga dapat berkembang. Pengembangan pariwisata di Bali diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sesuai dengan tujuan Kepariwisata Budaya Bali yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun

2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana tujuan kepariwisataan budaya Bali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja.

Perkembangan pariwisata di Provinsi Bali yang begitu pesat dilihat dari PDRB sektor Akomodasi, dan Makan Minum serta jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat tiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2013-2015). Di lain sisi adanya peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Bali. Sehingga, muncul keinginan pemerintah untuk mengembangkan potensi pariwisata secara terus menerus guna menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut, menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti, di mana Provinsi Bali sebagai wilayah studi penelitian. Menurut pendapat para ahli (Rai Utama; 2011, Yoeti; 1996:23-4, dan Warpani; 2007:79) menyatakan bahwa pariwisata akan mampu membuka lapangan kerja, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat, penyebaran aktivitas ekonomi, membantu pemerataan pendapatan penduduk, serta memberdayakan masyarakat, sehingga pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terdapat beberapa isu terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui pariwisata yang diidentifikasi untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini :

1. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali menyentuh angka 196.000 jiwa, di mana mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 7,34%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sebesar 4,77% dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Bali (Bali Dalam Angka Tahun 2015);
2. Jumlah kunjungan wisata ke Provinsi Bali meningkat dari tahun 2012-2014, namun jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dari tahun 2012-2014 meningkat pula. Hal tersebut dapat dilihat pada Kabupaten Buleleng yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng sebanyak 43.738 jiwa, mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 8,46%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng

sebesar 22,29% dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Sementara itu, jumlah kunjungan wisata pada tahun 2014 ke Kabupaten Buleleng sebanyak 663.826 jiwa, mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 4,02%. Jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Buleleng sebesar 5,04% dari jumlah kunjungan wisata ke Provinsi Bali (Bali dan Kabupaten/Kota Dalam Angka tahun 2015); dan

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran, serta Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menjadi strategi serta prioritas penting dalam pembangunan daerah Provinsi Bali tahun 2016. Hal tersebut, disesuaikan dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, Agenda Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Isu dan Permasalahan yang ada (Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Provinsi Bali Tahun 2016).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah tersebut terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui pariwisata di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali ?
2. Bagaimana hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali ?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali;
2. Mengetahui hubungan pengembangan pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali;

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat bagi keilmuan
  - a. Dengan adanya penelitian tentang hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali dapat diketahui konsep-

konsep pengembangan pariwisata yang digunakan pada objek wisata yang terdapat di Provinsi Bali.

- b. Hasil penelitian tentang hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali nantinya diharapkan dapat menambah wawasan tentang konsep pariwisata yang mampu mengurangi kemiskinan, terutama konsep pariwisata di Provinsi Bali.
  - c. Hasil studi semakin memperkaya pengalaman dan dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan studi mengenai hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan pada daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai potensi daya tarik wisata, sehingga semakin memperkaya wacana mengenai hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
  - d. Memberikan masukan mengenai usaha pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan secara luas berdasarkan karakteristik kawasan tersebut. Sebagai salah satu upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan merangkul masyarakat di kawasan objek wisata tersebut.
2. Manfaat bagi praktisi
- a. Memberikan informasi dan wacana tentang pentingnya pemahaman mengenai hubungan pengembangan pariwisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
  - b. Menambah referensi bagi praktisi dalam rangka melihat hubungan pengembangan pariwisata yang mengupayakan pengentasan kemiskinan.

## 1.5 Ruang Lingkup Studi

### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Bali dengan Ibu kotanya adalah Kota Denpasar, yang meliputi Pulau Bali, Pulau Nusa Penida serta beberapa Pulau-pulau kecil lainnya dengan luas wilayah 5.636,66 km<sup>2</sup> dan panjang pantai mencapai 529 km. Provinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota (**Gambar 1.2**), 55 Kecamatan dan 701 Desa/Kelurahan, 3.563 Banjar/Dusun/Lingkungan. Jumlah penduduk Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai 4.056.300 jiwa dengan kepadatan 720 jiwa/km<sup>2</sup>. Provinsi Bali berada pada posisi 8°3'40" dan 8°50'48" Lintang

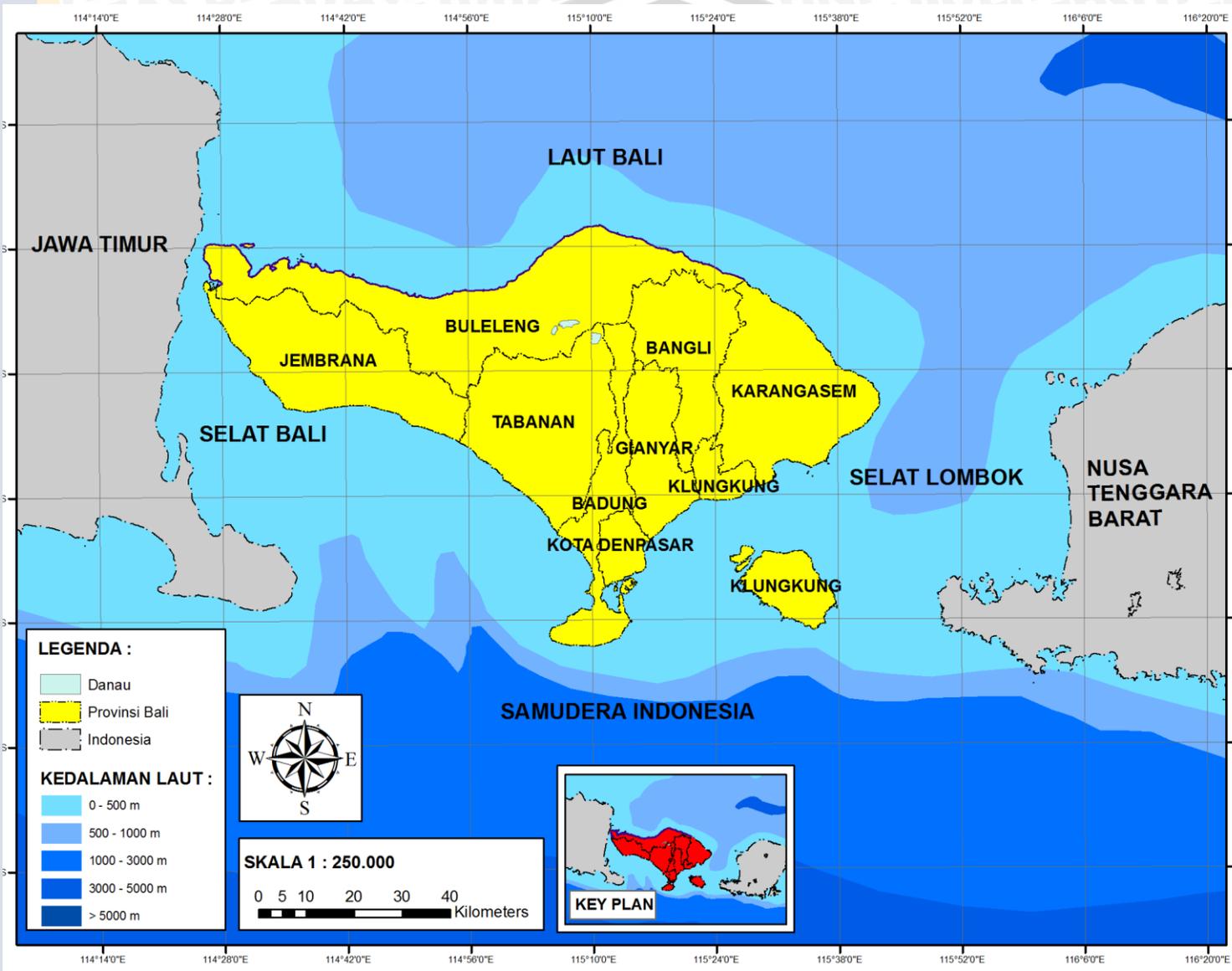
Selatan dan  $114^{\circ}25'53''$  dan  $115^{\circ}42'40''$  Bujur Timur, dengan batas administrasi (**Gambar 1.1**) :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | : Laut Bali;                                   |
| Sebelah Timur   | : Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat); |
| Sebelah Selatan | : Samudera Indonesia; dan                      |
| Sebelah Barat   | : Selat Bali (Provinsi Jawa Timur).            |

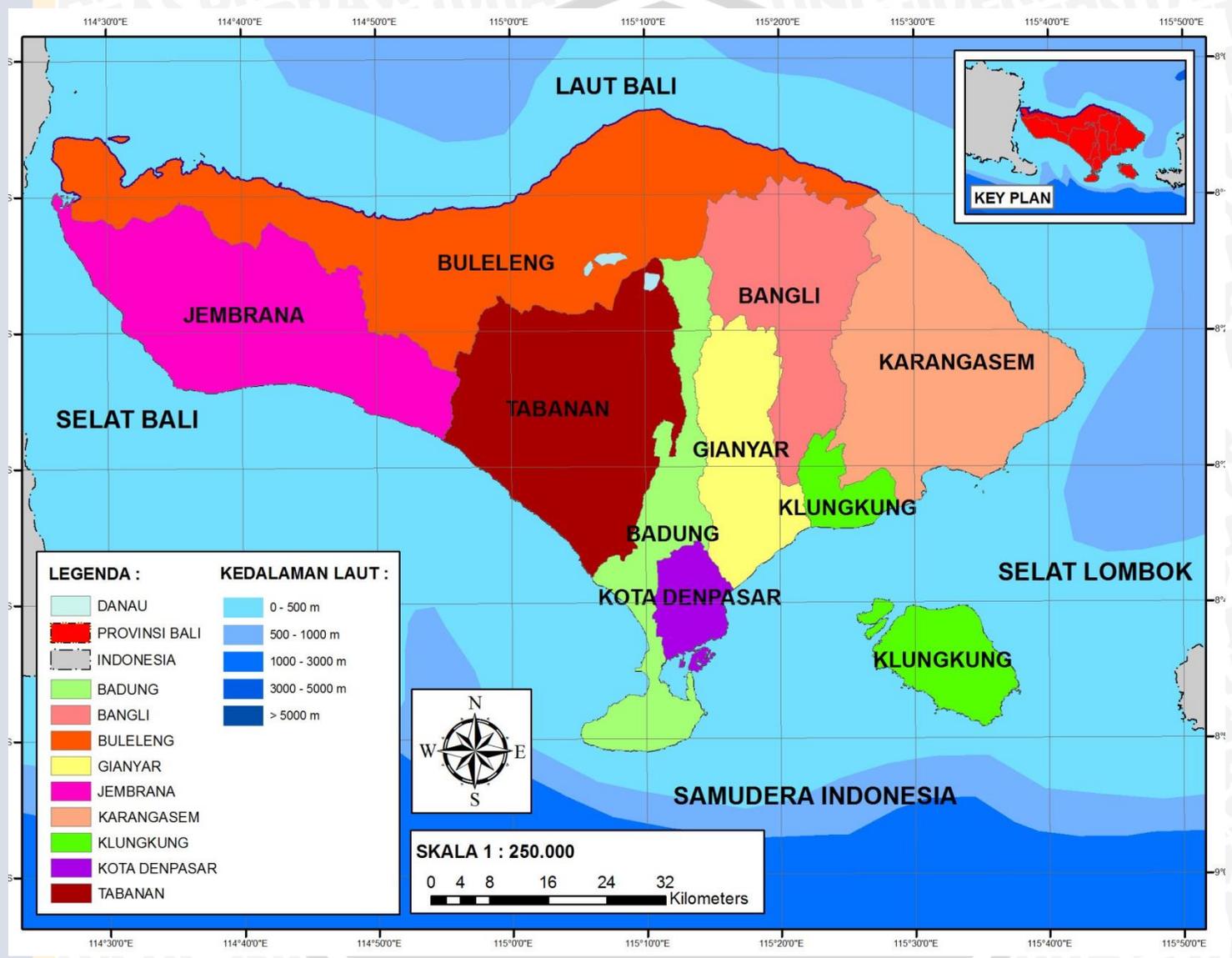
Pulau Bali memiliki letak yang sangat strategis, karena menghubungkan lalu lintas laut dan darat antara Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara.

Dasar pertimbangan dipilihnya Provinsi Bali sebagai wilayah studi adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Bali merupakan tujuan wisata yang sudah mendunia. Hal tersebut, terlihat dari peringkat Pulau Bali yang masuk ke dalam jajaran 10 besar daftar pulau terbaik di dunia, di mana pada tahun 2013 Pulau Bali menduduki peringkat 6 dan naik satu tingkat menjadi peringkat 5 pada tahun 2014.
2. Provinsi Bali mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar, baik alam, budaya, maupun religinya.
3. Provinsi Bali masih memiliki masalah dengan upaya pengentasan kemiskinan, di mana terjadi peningkatan jumlah kemiskinan tiap tahunnya selama 3 tahun terakhir (2013-2015) dengan rata-rata peningkatannya sebesar 10,84% per tahun. Peningkatan kemiskinan di Provinsi Bali secara umum terjadi hampir di setiap Kabupaten/Kota, padahal dengan pariwisata yang sudah mendunia seharusnya pengentasan kemiskinan dapat terwujud.



Gambar 1.1 Peta Orientasi Provinsi Bali



Gambar 1.2 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Penentuan ruang lingkup materi bertujuan untuk memberikan batasan agar pembahasan tidak terlalu luas dan memfokuskan arah penelitian sehingga tujuan studi dapat tercapai. Materi yang dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini melihat kebijakan pengembangan pariwisata dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010-2025, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2028, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013-2018.
2. Penelitian ini melihat hubungan pengembangan pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali yang terbatas pada data-data sekunder yang diperoleh baik dari BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Bali serta data dari pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi Bali selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2013-2015). Data-data tersebut yaitu: jumlah wisatawan, PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi, dan makan minum, PDRB lapangan usaha transportasi dan pergudangan, PDRB lapangan usaha informasi dan komunikasi, PDRB lapangan usaha industri pengolahan, ketersediaan akomodasi wisata, ketersediaan restoran dan rumah makan, ketersediaan bar, ketersediaan moda angkutan, ketersediaan lembaga keuangan, ketersediaan pusat perbelanjaan, jumlah daya tarik wisata, jumlah tenaga kerja, jumlah industri kecil dan menengah (IKM), jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, upah yang diterima (pendapatan per kapita), pengeluaran per kapita, garis kemiskinan per kapita, indeks gini, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), rumah sehat, serta rumah tidak sehat.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan *On-going Evaluation*. *On-going Evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut sedang berjalan. Batasan ini digunakan karena kemiskinan dan pariwisata di Provinsi Bali sedang berjalan, di mana data yang diambil adalah data *time series* selama 3 tahun terakhir.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dari penelitian “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali” terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dari penelitian “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup Wilayah, Manfaat Perencanaan dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi teori-teori yang mendasari studi ini yang berasal dari literatur serta berbagai media informasi, penelitian, seminar dan lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk meneliti “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi metode-metode baik metode kualitatif maupun kuantitatif yang digunakan untuk analisis “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian di lapangan dan data-data yang berkaitan dengan studi yang dilakukan, meliputi gambaran umum wilayah studi, “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis yang digunakan dalam studi, serta rekomendasi dan saran terkait “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”.

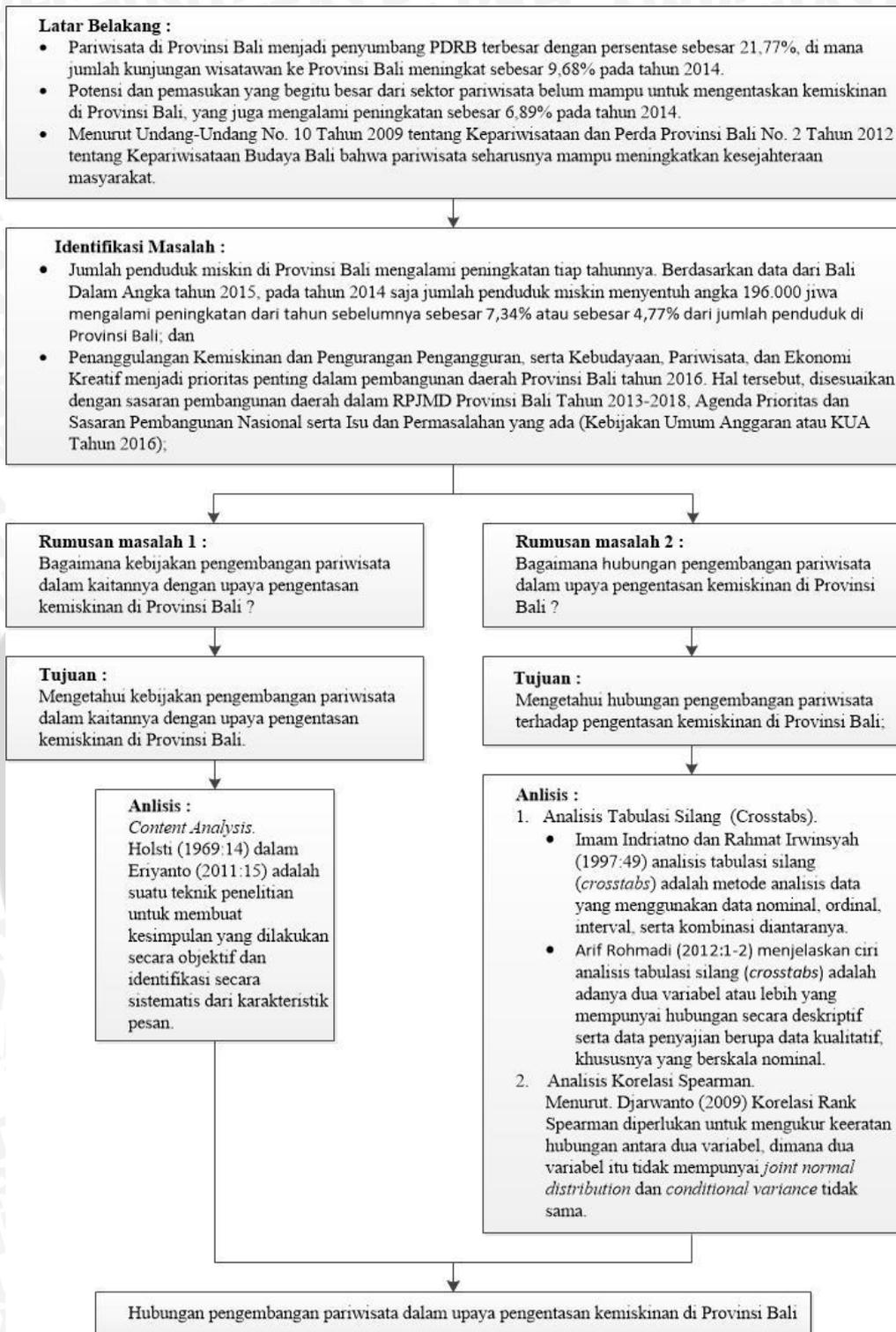
**DAFTAR PUSTAKA :**

Berisi tentang daftar literatur yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian “Hubungan Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali”.

**1.7 Kerangka Pemikiran**

Menurut buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tahun akademik 2014/2015, kerangka pemikiran merupakan penjelasan dari alur pemikiran penelitian, yang menjelaskan keterhubungan antara permasalahan penelitian, konsep-konsep teoritik dengan variabel dan indikator, sehingga arah penelitian dapat diketahui (**Gambar 1.2**).





Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran